MODEL PENDAMPINGAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPTENSI TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL
(BPPAUDNI) REGIONAL III
2012

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUD-NI). Pengembangan model adalah upaya penemuan sesuatu yang baru (adaftif dan inovatif) menurut kaidah dan metode ilmiah tertentu sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki (PERMENPAN & RB Nomor 15 Tahun 2010).

Program pendidikan keaksaraan merupakan layanan pendidikan nonformal untuk membelajarankan warga masyarakat penyandang buta aksara, agar memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung, dan menulis, yang berorintasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga warga belajar dan mayarakat dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. Oleh karena itu prinsip penyelenggaraan harus didasarkan pada konteks lokal, disain lokal, partisipatif dan fungsionaliasi hasil belajar. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional melalui survey. Pusat Statistik Pendidikan 2010 jumlah penduduk buta aksara usia 15 sampai 59 tahun di Indonesia tercatat masih cukup banyak, yaitu 7.547.344 (Sumber; BPS dan Kemdikbud 2012).

Setiap tahun BPPNFI Regional V Makassar menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program PAUDNI, salah satu diantaranya adalah program pendidikan keaksaraan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program dan apa permasakahan yang dihadapi. Hasilnya ditemukan beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraaan.

Antara lain kemapuan tutor dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini terlihat pada kemampuan tutor dalam merencanakan program pembelajaran, penerapan metode pembelajaran, penyusunan bahan ajar muatan lokal dan penilaian hasil belajar. Tingkat kualifikasi pendidikan tutor masih rendah, rata-rata tingkat pendidikan adalah SMA dan SMP bahkan ada yang hanya berijazah SD.

Hasil studi eksplorasi dalam rangka pengembangan model yang dilaksanakan pada tiga lokasi, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru diperoleh informasi tentang penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan yaitu:

1. Kemampuan tutor dalam merencanakan program pembelajaran masih lemah. Tema-tema pembelajaran yang diangkat belum sepenuhnya digali dari desain lokal.
2. Materi belajar membaca, menulis, dan berhitung belum dintegrasikan dengan keterampilan fungsional.
3. Metode pembelajaran cenedrung klasikal, belum banyak variasinya, akibatnya warga belajar sering merasa bosan.
4. Bahan ajar digunakan belum digali dari konteks lokal, seperti penggunaan baha ibu.
5. Pendekatan strategi pembelajaran yang digunakan masih cenderung berpusat pada tutor.
6. Tingkat pemahaman tutor tentang teori belajar orang dewasa masih kurang.
7. Kemampuan tutor dalam merancang sistem penilaian hasil belajar masih kurang.

Keterbatasan anggaran untuk dalam meningkatkan kompetensi tutor melalui pendidikan dan pelatihan merupakan kendala dalam menagatasi masalah tersebut diatas. Setiap tahun memang ada Diklat untuk meningkatkan kompetensi tutor, tetapi jumlah yang dapat dilayani sangat kurang dibanding dengan jumlah tutor yang ada. Oleh karena itu, perlu mencari solusi lain, yaitu memanfaatkan potensi pamong belajar

yang ada di SKB/UPTD untuk menjadi pendamping. Hal ini sejalan dengan tugas pokok pamong belajar berdasarkan PERMENPAN Nomor 15 Tahun 2010.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Model bertujuan memberikan acuan bagi lembaga/organisasi maupun perorangan yang akan melaksanakan pendampingan dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan.

2. Tujuan Khusus
   a. Sebagai bahan acuan dalam pendampingan perencanaan pembelajaran
   b. Sebagai bahan acuan dalam pendampingan metode dan strategi pembelajaran pendidikan keaksaraan
   c. Sebagai bahan acuan dalam pendampingan penyusunan bahan ajar pendidikan keaksaraan
   d. Sebagai bahan acuan dalam pendampingan penilaian hasil belajar pendidikan keaksaraan.

C. Manfaat

1. Ditjen PAUDNI

   Sebagai bahan acuan bagi Direktorat yang terkait dalam membuat kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota

   Sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

3. Lembaga Penyelenggara

   Sebagai bahan acuan dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan

4. Pendamping

   Sebagai bahan acuan dalam melakukan pendampingan bagi tutor pendidikan keaksaraan.

D. Pengguna

1. Ditjen PAUDNI
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Lembaga penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan
4. Tenaga pendamping.

.

BAB II
LANDASAN

A. Landasan Hukum

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: Ketersediaan, Keterjangkauan, Peningkatan Kualitas, Kesetaraan Pendidikan yang nondiskriminatif, dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban antara lain: pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca masyarakat, serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifi kasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: swamanajemen, lingkungan sepanjang hayat, menghargai norma, nilai dan budaya, program berbasis kebutuhan, masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program, pemberdayan sebagai ciri utama, berakar pada nilai-nilai sosial, berbasis pengalaman, partisipatif, demokratis, serta berbasis kecakapan hidup.

Komitmen internasional yang dikenal dengan Deklarasi Dakkar mengamanatkan untuk menurunkan separuh jumlah penduduk buta aksara di masing-masing negara anggota UNESCO pada tahun 2015. Kebijakan ini direspons sangat positif oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006

tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA. Inpres tersebut mengamanatkan target pengurangan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas menjadi lima persen pada akhir tahun 2009. Ini berarti akan terjadi percepatan pengurangan separuh jumlah penduduk buta aksara di Indonesia sesuai target UNESCO.

Sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tersebut, telah tercapai target sisa penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sebesar 5% atau sekitar 8,3 juta orang, sebagian besar di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar bertempat tinggal di daerah tertinggal (terpencil, terisolir, pedalaman, perbatasan, pulau terluar atau pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, kawasan perdesaan miskin, komunitas adat terpencil, dan sejenisnya) yang secara geografi s umumnya sulit dijangkau. Umumnya mereka bermata pencaharian sebagai: petani, buruh, nelayan dan sebagian lain merupakan kelompok masyarakat miskin perkotaan yang bermata pencaharian sebagai buruh serabutan atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan mereka juga terbatas karena tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Penduduk buta aksara yang berdiam diri di daerah tertinggal tersebut, relatif sangat tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan dan sarat dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan hidup lainnya. Mereka merupakan kelompok masyarakat khusus (komunitas khusus) yang perlu mendapat perhatian khusus pula, karena umumnya mereka tidak memiliki pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam mempertahankan hidup.

Sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal sejak tahun 2009 menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan, baik keaksaraan

dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa yang berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara, apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biriokrasi (PERMENPAN DAN RB) Nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Dalam Permen-PAN tersebut disebutkan salah rincian tugas pamong belajar adalah melaksanakan pembimbingan. Kegiatan pembimbingan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pendampingan. Sasaran kegiatan pembimbingan adalah tenaga pendidik PAUDNI.

Hasil studi kelayakan yang dilaksanakan pada tiga lokasi, yaitu Kabupaten Barru, Soppeng dan Polewali Madar tentang penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualifikasi tutor rata-rata hanya tamatan SMA dan SMP sehingga sangat berpengaruh terhadap kompetensi tutor dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil belajar;
2. Kompetensi tutor dalam menyusun rencana pembelajaran masih lemah, rencana pembelajaran belum didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan belajar;
3. Metode dan strategi belajar yang diterapkan oleh tutor belum bervariasi sehingga kurang menarik;
4. Metode dan strategi pembelajaran belum dintegrasikan antara kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dengan keterampilan fungsional;
5. Tutor masih lemah dalam mengembangkan bahan ajar, terutama bahan ajar muatan lokal;

6. Bahan ajar muatan lokal yang menggunakan pendekatan bahasa ibu masih sangat terbatas;
7. Kompetensi tutor dalam menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar masih lemah;
8. Dalam menilai hasil belajar, tutor masih cenderung “menghakimi” sehinggal muncul rasa takut dari warga belajar;
9. Instrumen yang digunakan dalam menilai hasil belajar belum sepenuhnya mengacu pada SKK.

B. Landasan Konseptual

Unesco mendefenisikan kemampuan keaksaraan atau melek aksara sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kelimat sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan seorang dikatakan mempunyai kemampuan keaksaraan fungsional jika seseorang tersebut dapat terlibat dalam aktifitas di mana kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai effectif function kelompok dan sebagai dasar bagi dirinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya sendiri.

Pendidikan keaksaraan adalah suatu bentuk layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang belum dan ingin memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung), yang bersifat fungsional bagi kehidupannya. Warga belajar tidak hanya memiliki kemmpuan calistung, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan ketermpila berusaha atau bermata pencaharian saja, tetapi juga dapat beradaptasi dan bertahan hidup dalam kehidupan yang terus berubah.

Pengertian di atas memberi gambaran bahwa pendekatan yang harus digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan melputi: (1) mengembangkan kemampuan calistung dengan menekankan pada kemampuan menulis, membaca dan berhitung, (2) menekankan keterlibatan warga belajar secara aktif dan kreatif, (3) membangun

pengetahuan, pengalaman dengan memperhatikan tradisi lisan warga belajar (bahasa ibu) dan keaksaran lain, (3) dalam belajar mengutamakan bahan belajar yang digali dari lingkungan hidup warga belajar yang memiliki karasteristik beragam, (5) proses pembelajaran harus didisain agar responsive dan relevan dengan konteks social-kultural warga belajar.

Istilah fungsional dalam pendidikan keaksaraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan keaksaraan harus sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar warga belajar, (2) relevan dengan fungsi dan tujuan diselenggarakannya pembelajaran keksaraan fungsional, dan (3) ada jaminan bahwa hasil belajarnya benar-benar bermanfaat (fungsional) bagi peningkatan mutu dan taraf kehidupan warga belajar dan masyarakatnya.

1. Fungsi dan Tujuan

   Fungsi pendidikan keaksaraan adalah memberikan pengetahuan dasar bagi warga belajar yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang bersifat fungsional sebagai wahana untuk meningkatkan taraf hidup warga belajar. Keasaraan fungsional juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta kemampuan berusaha atau bermatapencaharian.

   Tujuan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan meliputi:

   a. Membelajarkan masyarakat buta aksara (warga belajar) agar mampu membaca, menulis dan berhitung, berbahasa Indonesia; memiliki pengetahuandan keterampilan dasar yang bemanfaat (fungsional) bagi peningkatan mutu dan taraf kehidupannya;
   b. Mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi;
   c. Melatih warga belajar dalam memanfaatkan kemampuan dan keterampilan keaksaraannya dalam kehidupan sehari-hari;

d. Memotivasi warga belajar sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri;
e. Mengembangkan kemampuan berusaha/ bermatapencaharian sehingga mampu meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.
f. Mengembangkn kemampuan dan minat baca warga belajar sehingga mampu menjadi bagian dari masyarakat gemar membaca.

2. Prinsip-prinsip Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan
   a. Konteks Lokal; agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka bahan belajar harus digali dari konteks lokal. Bahan belajar harus bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari warga belajar. Mereka yang hidup di daerah pedesaan berbeda kebutuhan belajarnya dengan di daerah perkotaaan.
   b. Disain Lokal; unsur-unsur pokok berkaitan penyajian pembelajaran seperti: tujuan, kelompok sasaran, bahan belajar, sarana belajar, kegiatan belajar, waktu dan tempat pertemuan, dirancang sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi lokal di mana kelompok belajar itu berada.
   c. Proses Partisipatif; program pendidikan keaksaraan harus mampu memobilisasi warga belajar untuk melakukan beragam tindakan atau perbuatan sehingga dapat mengembangkan regam keterampilan yang bermanfaat untuk memperbaiki mutu kehidupan dan taraf hidup warga belajar.
   d. Fungsionalisasi Hasil Belajar; program pendidikan keaksaraan harus memberikan manfaat dan makna yang berkaitan secara langsung dengan lingkungan hidup, pekerjaan/mata pencaharian, dan situasi keluarga, sehingga hasil belajar membei manfaaat bagi peningkatan mutu kehidupannya.
   e. Kesadaran; proses pembelajaran keaksaraan hendaknya dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga belajar terhadap keadaan dan permasalahan lingkungan untuk melakukan aktivitas

kehidupannya. Proses pembelajaran hendaknya dapat memotivasi warga belajar untuk berupaya memahami berbagai faktor yang berpengaruh terhadap masalah-masalah yang dihadapinya, dan ikut memikirkan alternatif cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

f. Fleksibilitas; program pendidikan keaksaraan harus fleksibel, agar memungkinkan untuk dimodifikasi sehingga responsif terhadap minat dan kebutuhan belajar serta kondisi lingkungan warga belajar yang berubah dari waktu ke waktu.
g. Keanekaragaman; program pendidikan keaksaraan hendaknya bervariasi dilihat dari segi materi, metode, maupun strategi pembelajarannya sehingga mampu memenuhi minat dan kebutuhan belajar warga belajar pada setiap daerah yang bebeda-beda.

C. Strategi Pembelajaran Orang Dewasa

Telah diketahui bersama bahwa sasaran program keaksaraan fungsional pada umumnya terdiri dari masyarakat orang dewasa, untuk itu dalam membelajarkan mereka tentu harus memperhatikan konsepsi belajar orang dewasa (Andragogi). Andragogi berasal dari bahasa Yunani yaitu ***"Andr"*** yang berarti orang dewasa, dan ***"Agogos"*** yang berarti memimpin atau membimbing (Arif; 1994). Dengan demikian andragogi adalah suatu ilmu dan seni untuk membantu orang dewasa belajar.

Malcolm Knowles dalam bukunya *"Andragogy in Action: Appliying Modern Principles of Adult Learning" San Fransisco: Jossey-Bas Publisher* (1984). mengemukakan beberapa hal penting mengenai konsepsi belajar orang dewasa, yaitu: (1) orang dewasa berbeda dengan anak-anak dalam hal sikap hidup, pandangan terhadap nilai-nilai hidup, minat, kebutuhan, ide/gagasan, hasrat-hasrat dan dorongan-dorongan untuk melakukan suatu perbuatan; (2) orang dewasa sudah banyak memiliki pengalaman-pengalaman hidup (lebih banyak dari pada anak-anak), maka mereka pada umumnya tidak mudah dirubah sikap hidupnya; (3) orang dewasa

mempunyai konsep diri yang kuat dan mempunyai kebutuhan untuk mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu mereka cenderung menolak apabila dibawa ke dalam situasi yang kurang lebih digurui atau diperlakukan seperti anak-anak; (4) pengalaman merupakan sumber yang paling kaya dalam proses belajar orang dewasa, oleh karena itu inti methodologi proses belajar orang dewasa adalah menganalisis pengalaman; (5) pada umumnya tidak ada perbedaan pada tingkat kecerdasan dan kemampuan belajar antara orang dewasa dan anak-anak, bila ada perbedaan-perbedaan mungkin hanya terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya; (6) orang akan lebih cepat dan lebih mudah menerima dan memahami isi pembelajaran, apabila ia telah dapat menyadari dan menginsafi manfaat dan pentingnya hasil belajar dalam kehidupan; dan (7) orang akan lebih mudah memahami suatu hal apabila itu dapat diterapkannnya melalui berbagai jenis panca indera (penglihatan, pendengaran, perasaan dan lain-lain), lebih-lebih apabila dihayati dengan jalan melakukannya sendiri, seperti kata pepatah **"**I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand" (saya dengar dan saya lupa, saya lihat maka saya ingat, dan saya lakukan maka saya mengerti). Jadi agar seseorang mengerti, kepadanya tidak hanya diperdengarkan dan diperlihatkan, tetapi juga didemonstrasikan dan diberi kesempatan untuk melakukannya sendiri.

Berdasarkan konsep dari Malcolm Knowles tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada empat konsep dasar dalam andragogi yang membedakan dengan pedagogi, yaitu (1) persepsi diri atau self concept, (2) pengalaman hidup, (3) kesiapan belajar, dan (4) perspektif atau orientasi waktu.

1. Persepsi diri (self concept)

   Orang dewasa sadar bahwa ia dapat mengambil keputusan mengenai dirinya sendiri. Oleh sebab itu, orang dewasa selalu merasa dihormati kalau diberi kesempatan untuk menentukan kebutuhannya dan mengambil keputusan sendiri. Knowles berpendapat bahwa orang

dewasa cenderung untuk menentang belajar dalam kondisi yang tidak sesuai dengan persepsi mengenai diri sendiri, yaitu sebagai individu-individu yang mandiri.

Hubungan tutor/ fasilitator dengan warga belajar orang dewasa adalah hubungan yang ada timbal baliknya, dimana terjadi usaha saling membantu antara kedua belah pihak. Tutor/ fasilitator tidak memaksakan pandangan dan kemauannya terhadap para warga belajar orang dewasa, dan berusaha untuk memberi tanggung jawab atas proses belajar kepada warga belajar.

2. Pengalaman hidup.

   Pengalaman orang dewasa merupakan sumber belajar yang amat berharga dalam pendekatan andragogi. Andragogi menekankan teknik-teknik komunikasi dua arah, misalnya diskusi kelompok, simulasi, dan analisis studi kasus. Melalui metode tersebut, semua warga belajar memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan memberi masukan berdasarkan pengalaman masing-masing.

3. Kesiapan untuk belajar

   Kesiapan orang dewasa untuk belajar ditentukan oleh kebutuhan yang berhubungan dengan peranannya dan fungsinya sehari-hari, misalnya dalam pekerjaannya untuk mencari nafkah ataupun dalam pekerjaannya di rumah tangga. Orang dewasa terdorong untuk belajar kalau ia sadar bahwa ia perlu memperoleh suatu kompetensi atau kemampuan untuk dapat melaksanakan peranannya atau fungsinya secara lebih baik.

   Tutor/ fasilitator dalam konteks andragogi membantu warga belajar mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, dan mengusulkan berbagai kompetensi yang dapat dicapai untuk memperlancar pelaksanaan fungsi mereka.

4. Perspektif atau orientasi waktu

   Dalam konteks andragogi suatu proses belajar yang berpusat kepada penyempurnaan atau perbaikan situasi dan pengalaman yang berhubungan dengan realitas pada masa ini. Inti dari proses andragogi adalah menemukan ’ dimana kita sekarang berada serta ke arah mana kita menuju’.

D. Kompetensi

Mulyasa E, dalam bukunya *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung,Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,keterampilan, dan sikap/nilai/norma yang dimiliki dan menjadi bagian karekter individu yang diaktualisasikan dalam cara berfikir dan bertindak. Sedangkan standar kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap/nilai/norma yang dibakukan. (Mulyasa E, 2000;87)

Selanjutnya , Paul Hersey mendefenisikan kompetensi adalah kemampuan seseorang didalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kompetensi juga berarti kekuatan, atau kapasitas seseorang yang diukur dari hasil kerja/kinerja sesorang sesuai jenis pekerjaannya. Kata kompetensi juga diartikan sebagai standar minimal yang harus dimiliki sesorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya(Pul Hersey,1995).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang pendamping dibutuhkan minal empat kompetensi, yaitu: (1) memiliki kematangan/kedewasaan yang dapat diandalkan, (2) memiliki sikap empaty terhadapmasalah yang dirasakan kelompok, (3) tulus, ikhlas, jujur, berani dan memiliki komitmen yang tinggi, dan (4) kreatif dalam memecahkan masalah.

Dalam kaitannya dengan program pendidikan keaksaraan, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendamping, yaitu::

1. Kompetensi Agragogik yaitu: menguasai dan terampil menggunakan prinsip pendidikan orang dewasa
2. Kompotensi Profesional; yaitu menguasai konsep dasar pendidikan keaksaraan, menguasai prinsip dalam menyusun rencana pembelajaran, menguasai metode dan strategi pembelajaran pendidikan keaksaraan, dan menguasai prinsip dasar penilian hasil belajar pendidikan keaksaraan.
3. Kompetensi Sosial; yaitu kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan dan kemampuan menggali potensi lokal, termasuk memahami budaya setempat.
4. Kompetensi Kepribadian, yaitu kemampuan bekerja secara mandiri dan memiliki komitmen terhadap tugasnya sebagai pendamping.

E. Pendampingan Partisipatif

1. Pengertian

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan partisipatif lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan.

Kata paratisipatif berasal dari kata partisipasi atau dalam bahasa Inggris *Paticipation* yang berarti “turut serta”, turut mengambil bagian atau terlibat langsung. Orang yang berpartisipasi disebut partisipan. Pendampingan partisipatif berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan mau kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan

kelompok, dimana pendamaping ikut terlibat secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh orang yang didampingi. Pendampingan partisipatif diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan partisipatif merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2. Prinsip Pendampingan

Setiap pendampingan haruslah didasarkan pada nilai dasar yang dianut oleh setiap pendamping. Nilai dasar tersebut kemudian dituangkan melalui beberapa prinsip pandampingan, yaitu:

1. Demokratisasi, artinya setiap pendampingan yang dilakukan tidak didasari oleh dominasi pendamping, akan tetapi berdasarkan berbagai kesepakatan tersebut dapat dicapai melalui consensus.
2. Partisipatif, pendampingan haruslah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut. Mulai dari inisiasi gagasan, perencanaan bersama, program aksi sampai pada pengendalian haruslah melibatkan seluruh elemen program.
3. Keswadayaan, pendamping haruslah hidup dan berkembang atas dasar pendayagunaan sumber daya lokal.
4. Non diskriminasi, pendampingan haruslah menghindarkan diri dari sikap dan tindakan diskriminatif terhadap siapapun.

(http//www.mpbi.org; Tri Suhartini Matowani, SST, dinduh tanggal 12 Februari 2012)

3. Peran Pendamping
    a. Fasilitator, yakni membantu masyarakat untuk menyadari, mengenali, merumuskan dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi.
    b. Motivator, yakni mendorong, mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah.
    c. Inovator, yakni bersama masayarakat melahirkan gagasan baru yang sesuai dengan kebutuhanuntuk mengatasi masalahnya.
    d. Katalisator, yakni menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak lain yang bias membantu.
    e. Dinamisator, yakni menjaga agar masyarakat mempertahankan kelangsungan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi masalahnya.
    f. Evaluator, yakni bersama masyarakat menilai, mengukur kemajuan, dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
    g. Advocator, yakni membimbing, memberi konsultasi, menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya serta membela kepentingan masyarakat.

    (http//www.mpbi.org; Tri Suhartini Matowani, SST, dinduh tanggal 12 Februari 2012)

BAB III

KARASTERISTIK MODEL

A. Gambaran Model

Model pendampingan partisipatif dalam rangka peningkatan kompetensi tutor pendidikan keaksaraan diarahkan untuk membantu para tutor dalam memecahkan masalah mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran, sampai penilaian hasil belajar. Dalam pelaksanaan model ini, ada tiga tahapan yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan pendampingan dan evaluasi hasil pendampingan.

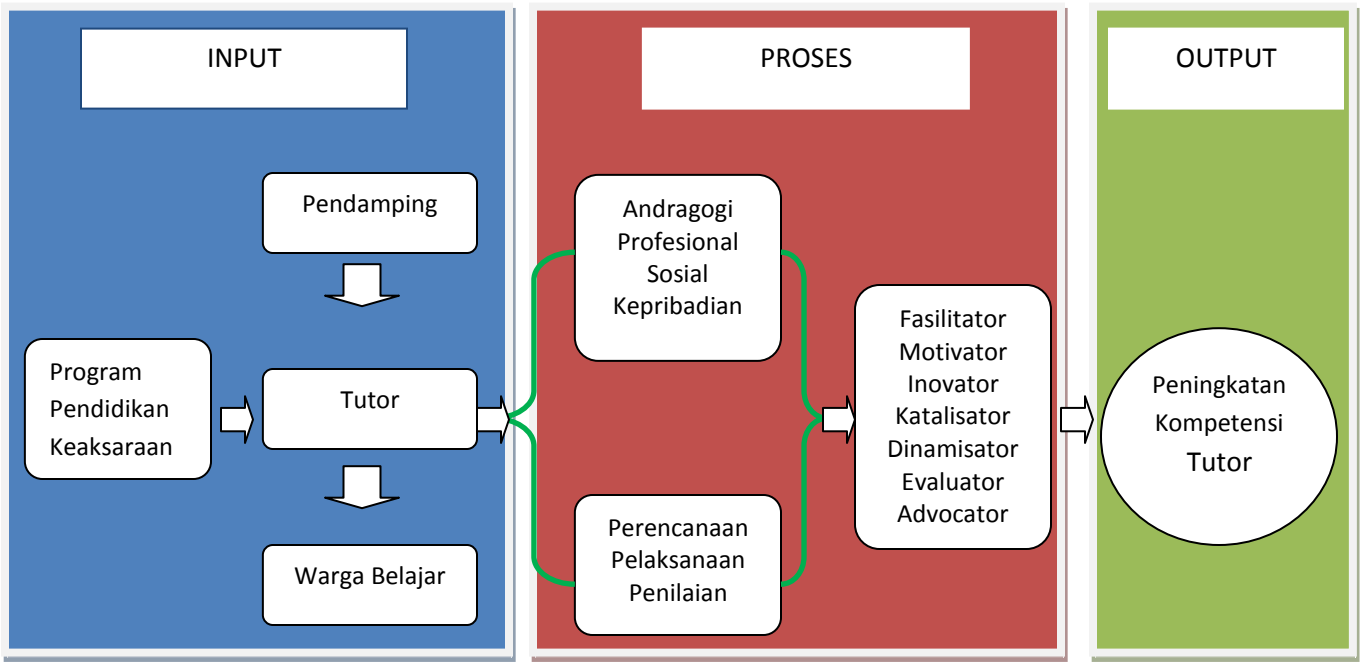

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan yang pertama dilakukan sebelum melaksanakan pendampingan. Pada tahapan ini kegiatan yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi komponen

permasalahan dan kelemahan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan. Komponen tersebut meliputi:

- Rekruitmen warga belajar.
- Rekruitmen tutor.
- Identifikasi kebutuhan belajar.
- Rencana pembelajaran.
- Bahan ajar.
- Metode dan strategi pembelajaran.
- Penilaian hasil belajar.

Kegiatan kedua adalah menyusun panduan pendampingan berdasarkan hasil identifikasi masalah. Panduan ini akan digunakan oleh pendamping untuk memberikan bimbingan kepada tutor. Kegiatan ketiga adalah merekrut tenaga pendamping sesuai criteria yang telah ditetapkan. Kegiatan keempat yaitu menyusun program pendampingan yang memuat waktu, tempat dan pelaksanan.

2. Pelaksanaan

   Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pendampingan, yaitu

   a. Rekruitmen calon pendamping, sebelum merekrut calon pendamping, ada dua hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan dan kompetensi yang dimiliki.
   b. Orientasi calon pendamping, materi orientasi meliputi teori pendidikan orang dewasa, konsep dasar pendidikan keaksaraan, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, tugas dan fungsi pendamping.

3. Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan pada model pendampingan partisipatif bagi tutor pendidikan keaksaraan adalah: evaluasi proses pendampingan oleh pendamping dan evaluasi terhadap peningkatan kompetensi tutor yang telah didampingi.

B. Komponen Model

1. Pendamping

   Kriteria pendamping

   a. Berpendidikan minimal SMA atau sederajad.
   b. Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah sasaran pendampingan.
   c. Memahami teori belajar orang dewasa.
   d. Memahami konsep dasar pendidikan keaksaraan
   e. Memahami metode dan strategi pemebelajaran pendidikan keaksaraan.
   f. Sanggup dan bersedia jadi pendamping.

2. Tugas dan Fungsi Pendamping

   a. Fasilitator, yakni membantu tutor dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan belajar, merumuskan dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi.
   b. Motivator, yakni mendorong tutor untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran.
   c. Inovator, yakni bersama-sama tutor melahirkan gagasan baru yang sesuai dengan kebutuhanuntuk mengatasi masalahnya.
   d. Katalisator, yakni menjadi penghubung dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu memecahkan.
   e. Dinamisator, yakni mempertahankan kelangsungan kegiatan kelompok belajar yang didampingi.
   f. Evaluator, yakni bersama-sama tutor menilai, mengukur kemajuan, dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
   g. Advocator, yakni membimbing, memberi konsultasi, menyadarkan tutor dan warga belajar akan hak dan kewajibannya untuk keberlangsungan proses kegiatan di kelompok belajar.

3. Bahan Ajar

Bahan ajar yang digunakan berupa panduan-panduan untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi pendamping dalam dalam memberikan bimbingan terhadap tutor. Bahan ajar meliputi:

a. Panduan identifikasi kebutuhan belajar;
b. Panduan penyusunan rencana pembelajaran;
c. Panduan metode dan strategi pembelajaran;
d. Panduan penyusunan bahan ajar; dan
e. Panduan penyusunan penilaian hasil belajar.

4. Metode Pendampingan Partisipatif

a. Ceramah

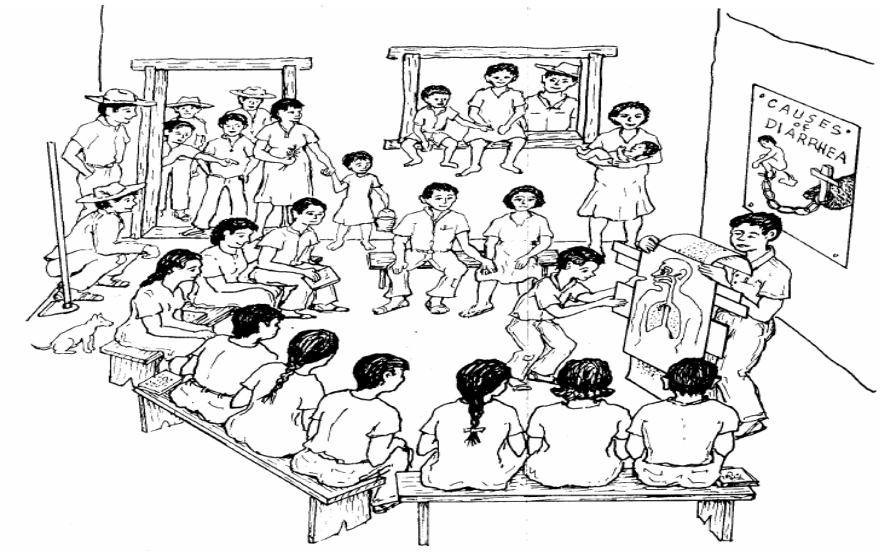

Metode ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah dengan kombinasi metode yang bervariasi. Mengapa disebut demikian, sebab ceramah dilakukan dengan ditujukan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipatif (curah pendapat,disko, pleno,penugasan, studi kasus, dll). Selain itu, ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah yang cenderung interaktif, yaitu melibatkan peserta melalui

adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman peserta. Media pendukung yang digunakan, seperti bahan serahan (handouts), transparansi yang ditayangkan dengan OHP, bahan presentasi yang ditayangkan dengan LCD, tulisan-tulisan di kartu metaplan dan/kertas plano, dll.

b. Diskusi

Metode ini bertujuan untuk tukar menukar gagasan, pemikiran, informasi/ pengalaman diantara peserta, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya, seperti: penjelasan (ceramah), curah pendapat, diskusi kelompok, permainan, dan lain-lain.

c. Curah Pendapat

Metode curah pendapat adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman, dari semua peserta. Berbeda dengan diskusi, dimana gagasan dari seseorang dapat ditanggapi (didukung, dilengkapi, dikurangi, atau tidak disepakati) oleh peserta lain, pada penggunaan metode curah pendapat pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Tujuan curah pendapat adalah untuk membuat kompilasi (kumpulan) pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan peta informasi, peta pengalaman, atau peta gagasan (mindmap) untuk menjadi pembelajaran bersama.

d. Bermain Peran

Bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk ‘menghadirkan’ peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu ‘pertunjukan peran’ di dalam kelas/pertemuan, yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap . Misalnya: menilai keunggulan maupun kelemahan masing-masing peran tersebut, dan kemudian memberikan saran/ alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut. Metode ini lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam ‘pertunjukan; dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan permainan peran.

5. Program

Program pendampingan dibuat oleh pendamping, setiap bulan minimal empat kali mendatangi kelompok belajar. Pendamping membuat laporan kemajuan yang dicapai oleh tutor memperhatikan indikator keberhasilan pendampingan.

6. Pendanaan

Untuk menunjang operional pendampingan, dibutuhkan biaya pendamping selama kegiatan program belangsung. Besarnya biaya untuk pendampingan yaitu 7% dari *unitcost* per warga belajar.

7. Penilaian

   Ada dua komponen yang menjadi sasaran penilaian keberhasilan pendampingan, yaitu peningkatan komptensi tutor dan pencapaian standar kompetensi keaksaraan warga belajar. Keberhasilan pendampingan dapat dilihat dari indikator keberhasilan model. Sedangkan pencapaian standar kompetensi keaksaraan dapat dilihat kemampuan membaca, menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pedoman penilaian pendidikan keaksaraan.

C. Indikator Keberhasilan

1. Tutor mampu menyusun identifikasi kebutuhan belajar;
2. Tutor mampu menyusun dan memiliki rencana pembelajaran;
3. Tutor mampu menerapkan metode dan strategi pembelajaran;
4. Ada bahan ajar muatan lokal dengan pendekatan bahasa ibu; dan
5. Ada instrumen penilaian hasil hasil belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Dikmas, 2005, *Pedoman Umum Pelatihan Program Keaksaraan Fungsional*, Jakarta

Djay go blog. (2001). *Konsep Pendampingan partisipatif Desa Siaga.* (diunduh, tgl 23 Agust 2011).

H.S.Bola (1986) *Menilai Keaksaraan Fungsional*; Terjemahan oleh Zulkarnain, IKIP Jakarta

http//www.mpbi.org; Tri Suhartini Matowani, SST, *Pendampingan Partisipatif* (dinduh tanggal 12 Februari 2012)

Harisman dkk, (2011) *Model Pendampingan Partisipatif Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pendidikan PAUD pada Daerah Pesisir dan Kepulauan*, BPPNFI Regional V Makassar

Kusnadi, dkk (2005) Pendidikan Keaksaraan Filosofi, Strategi, Implementasi, Jakarta

Mappa S dan Basleman A (1994) *Teori Belajar Orang Dewasa*, Jakarta, Depdikbud

Mulyasa E (2000), *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung, Remaja Rosdakarya Bandung

PERMENPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2010, Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya

Sudjana, H.D, 2005, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Falah Production

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung, Bandung